

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan penelitian penulis tentang mengapa *back channel negotiation* berhasil dalam mewujudkan Oslo Agreement. Setelah melakukan analisis terhadap variabel dependen dan variabel independent, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan *back channel* tersebut didasarkan atas 4 (empat) kategori ketidakpastian yang mencerminkan dilema-dilema yang dihadapi oleh para *peacemakers* dan masing-masing dilema tersebut dapat mengarah pada penggunaan *back channel*. Empat kategori dari ketidakpastian tersebut antara lain: pertama, ketidakpastian terhadap *the costs of entry*; kedua, ketidakpastian terhadap hadirnya *spoilers*; ketiga, ketidakpastian untuk menentukan *interest* dan *priorities*; serta keempat, ketidakpastian mengenai *outcome*.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka pada buku-buku tentang negosiasi dan diplomasi serta jurnal dan tesis-tesis sebelumnya tentang negosiasi dan *back channel negotiation*. Sedangkan metode untuk data tentang ketidakpastian *the costs of entry*, *spoilers*, *underlying interest and priorities*, dan *outcome* dilakukan dengan studi dokumen-dokumen yang diperoleh juga dari buku-buku dan jurnal ilmiah tentang Oslo Agreement dan proses perdamaian Israel-Palestina. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisa dengan menggunakan studi kasus Oslo Agreement yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai penggunaan *back channel* dalam proses negosiasi untuk perdamaian antara Israel dan Palestina.

Pada **Bab 2** tentang teori *back channel negotiation* atau teori negosiasi tertutup, penulis menemukan bahwa penggunaan negosiasi tertutup telah lama ada di dunia diplomasi. Diplomasi rahasia atau yang dikenal juga sebagai diplomasi lama, telah ada sebelum Perang Dunia I ketika banyak dari sistem pemerintahan saat itu umumnya monarki absolut. Pasca Perang Dunia I, penggunaan negosiasi secara terbuka pun muncul sebagai tuntutan atas sistem pemerintahan demokrasi. Walau begitu penggunaan negosiasi rahasia mulai digunakan kembali dengan

alasan: banyaknya informasi resmi yang harus dilindungi, kebutuhan negosiator untuk leluasa meninggalkan negosiasi jika hasil keputusan yang disepakati tidak dimungkinkan untuk dicapai, dan keinginan untuk meminimalisir gangguan dari pihak oposisi.

Selain itu penulis menemukan bahwa *back channel negotiation* memiliki beberapa karakteristik penting yang tidak dimiliki oleh negosiasi terbuka. **Pertama**, negosiator *back channel* umumnya individu-individu tertentu yang memiliki akses istimewa kepada presiden atau perdana menteri. kedekatannya ini mereka memiliki otoritas untuk menyelidiki pilihan-pilihan secara lebih luas dan lebih siap untuk melakukan suatu kesepakatan sementara daripada negosiator *front channel*. **Kedua**, Negosiator *back channel* terkadang adalah orang yang menjual jasa tanpa terikat pada suatu status resmi atau tanpa sepengetahuan kepala pemerintahan, namun seringkali memiliki hubungan yang kuat dengan para pembuat kebijakan dan mereka kemudian dapat memperoleh status resminya setelah usaha mereka mulai menunjukkan keberhasilan dengan meraih suatu kesepakatan. **Ketiga**, *back channel negotiation* terkadang digunakan untuk menghindari gangguan atau campur tangan pihak ketiga yang memiliki kepentingan pada proses negosiasi. **Keempat**, kurangnya keterlibatan media dalam mengamati jalannya proses negosiasi yang pemberitaannya terkadang dianggap mengganggu jalannya proses negosiasi.

Pada **Bab 3** tentang latar belakang sejarah konflik antara Israel dan Palestina, penulis menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Arab Palestina adalah klaim yang sama terhadap satu wilayah. Konflik diantara kedua belah pihak mulai dirasakan pada abad ke-19 ketika Yahudi banyak menempati tanah Palestina setelah sekian lama tanah tersebut dikuasai oleh bangsa Arab. Konflik semakin memanas pasca Yahudi mengumumkan pendirian Negara Israel tahun 1948 di wilayah Palestina. Negara-negara Arab yang merasa tersinggung dengan pendirian negara Yahudi ini, mulai melakukan penyerangan di tahun yang sama hingga 1978, yang diantaranya adalah Perang di Terusan Suez, Perang Enam Hari dan Perang Yom Kippur. Namun tak satupun dari perang tersebut berhasil dimenangkan oleh bangsa Arab.

Israel malah semakin melebarkan kekuasaannya pasca kemenangannya terhadap perang melawan Arab.

Penulis juga menemukan bahwa walaupun organisasi perlawanan telah dibentuk, seperti PLO (yang diisi oleh Fatah) dan Hamas, kondisi baik untuk masyarakat Arab Palestina tak juga datang. Kekecewaan pun melanda masyarakat tersebut yang kemudian memicu terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan Intifada. Dampak yang ditimbulkan oleh gerakan pemberontakan ini cukup besar sehingga memaksa PLO mulai melakukan pendekatan lain terhadap Israel. Selain itu, dengan kekalahan Irak pada Perang Teluk, Palestina semakin kehilangan sandaran terakhirnya yang semakin meyakinkan PLO untuk berdamai saja dengan Israel. Di sisi lain, Israel pun merasakan hal yang sama. Israel yang mulai mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat serta kekhawatirannya terhadap peningkatan senjata-senjata perang pasca Intifada dan Perang Teluk, memaksa Israel untuk berdamai dengan Palestina. Akhirnya proses negosiasi perdamaian pun mulai diselenggarakan yang berawal dari *Madrid Talks*. Namun ternyata, proses perdamaian ini tidak berjalan sesuai rencana dan harapan untuk perdamaian antara Israel dan Palestina belum juga terwujud.

Pada **Bab 4** penulis menemukan bahwa kebuntuan yang dialami oleh Madrid Talks, membuat para pihak untuk memikirkan cara lain agar proses perdamaian antara Israel dan Palestina dapat terus dilanjutkan. Cara lain itu muncul ketika adanya kesempatan untuk mengadakan negosiasi tertutup di Oslo, Norwegia. Proses negosiasi Oslo diantara Israel dan Palestina terbagi atas 2 (dua) tahap dan berlangsung selama 12 (dua belas) ronde.

Tahap pertama adalah tahap dimana telah ada perwakilan resmi dari PLO, namun belum ada perwakilan resmi dari Israel. Tahap ini menjalankan 5 (lima) ronde yang berlangsung dari tanggal 20 Januari 1993 hingga 9 Mei 1993. Pada ronde pertama, hal terpenting yang terjadi adalah keterlibatan delegasi resmi dari PLO dan pembahasan kedua belah pihak tentang penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza. Pertemuan kedua membahas tentang batasan yurisdiksi pemerintahan mandiri Palestina. Diantara ronde kedua dan ketiga, delegasi Israel mulai mencari legitimasi proses negosiasi Oslo melalui pemerintahannya setelah melihat keseriusan dari pihak PLO. Pada ronde ketiga, delegasi kedua belah pihak

telah menghasilkan satu pasal bagi *Declaration of Principles* mengenai persetujuan keterlibatan masing-masing pihak. Hal terpenting yang terjadi pada ronde keempat adalah penyampaian keinginan PLO untuk tidak hanya menginginkan Jalur Gaza tetapi juga Tepi Barat. Kemudian di ronde kelima, naskah perdamaian telah mencapai dua usulan: pertama, menetapkan masyarakat Jerussalem Timur untuk berpartisipasi sebagai kandidat dan pemilih dalam pemilihan umum Palestina; kedua, membagi proses perdamaian ke dalam dua tahap yakni tahap sementara dan permanen. Tahap permanen meliputi kesepakatan tentang politik Jerussalem, pengungsi Palestina, kedaulatan, garis batas negara dan keamanan. Penentuan wilayah yang akan dikuasai oleh Palestina selama periode sementara, secara spesifik tidak dijelaskan di dalam naskah tersebut.

Tahap kedua adalah tahap dimana Israel telah mengirimkan perwakilan resminya untuk negosiasi ini. Tahap ini menjalankan 7 (tujuh) ronde, ronde keenam hingga ronde kedua belas, yang berlangsung dari tanggal 20 Mei 1993 hingga 19 Agustus 1993. Pada ronde keenam, untuk pertama kalinya delegasi resmi dari Israel ikut serta pada negosiasi Oslo. Ronde ini mendiskusikan permintaan PLO terhadap Jericho, salah satu kota kecil yang berada di Tepi Barat, setelah Israel menolak untuk memberikan Tepi Barat seluruhnya kepada PLO. Pada ronde ketujuh dan kedelapan dari negosiasi Oslo, muncul dinamika baru dalam bernegosiasi sehubungan dengan kedatangan pengacara Israel, Joel Singer, yang bertindak sebagai konsultan hukum Kementrian Luar Negeri Israel. Perkembangan dari kedua ronde ini juga ditandai dengan keinginan delegasi Israel untuk membujuk kepala pemerintahannya agar bersedia memberikan pengakuan terhadap PLO. Ronde kesembilan mendiskusikan tentang rancangan baru *Declaration of Principles* dimana deklarasi ini juga mengatur tentang penyerahan otonomi Palestina secara perlahan-lahan terhadap Gaza dan Jericho.

Pada ronde kesepuluh, hal terpenting yang terjadi adalah dimasukkannya konsep *safe passage* pada rancangan deklarasi sebagai wilayah tambahan bagi Palestina selain Jalur Gaza dan Tepi Barat. Ronde kesebelas mendiskusikan beberapa permintaan baru dari PLO dan kekhawatiran Israel. PLO menginginkan agar dibentuk polisi Palestina di daerah-daerah otonomi, sedangkan Israel

menyatakan kekhawatirannya terhadap isu-isu keamanan dan pembatasan kekuasaan *Palestinian Council*. Pada ronde kedua belas, kedua belah pihak telah memperoleh kata sepakat tentang penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza yang akan menandai dimulainya status sementara dan negosiasi mengenai status final akan diselenggarakan tidak lebih dari 5 (lima) tahun semenjak penarikan mundur pasukan Israel. Pada tanggal 19 Agustus 1993, perwakilan delegasi PLO (Abu Ala' dan Hassan Asfour) serta delegasi Israel (Uri Savir dan Joel Singer) melakukan penandatanganan dokumen kesepakatan Israel dan PLO yang menandai selesainya proses negosiasi Oslo diantara kedua belah pihak. Akhirnya, pada tanggal 13 September 1993 Abu Mazen dan Shimon Peres melakukan penandatanganan *Declaration of Principles*, sementara Presiden Bill Clinton mengantarkan Yassir Arafat dan Yitzak Rabin untuk melakukan jabat tangan yang bersejarah dalam hubungan kedua belah pihak tersebut.

Pada **Bab 5** penulis menemukan bahwa penggunaan negosiasi tertutup pada proses negosiasi Oslo didasarkan atas 4 (empat) kategori ketidakpastian yang mencerminkan dilema-dilema yang dihadapi oleh para *peacemakers* Israel dan Palestina. **Pertama**, adalah ketidakpastian kedua belah pihak dalam menentukan prakondisi apa yang akan diajukan untuk negosiasi (*the cost of entry*). Untuk kasus Oslo Agreement, ketidakpastian dalam menentukan prakondisi apa yang akan diajukan juga melanda Israel dan PLO. Bagi PLO prakondisi yang dapat mereka berikan untuk menjamin keseriusannya terhadap proses perdamaian ini adalah dengan memberikan pengakuannya terhadap Negara Israel. Sedangkan bagi Israel prakondisi yang dapat mereka berikan untuk menjamin keterlibatannya pada proses Oslo adalah kesediaannya untuk memasukkan Jalur Gaza sebagai obyek yang akan didiskusikan pada perundingan pertama. Perbedaan-perbedaan yang mewarnai harapan dari masing-masing pihak inilah yang menimbulkan ketidakjelasan diantara para pihak. Israel yang tidak semerta-merta untuk memberikan pengakuannya terhadap PLO menjadikan PLO juga lebih berhati-hati terhadap prakondisi yang diajukan oleh Israel. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian dari kedua belah pihak yang akhirnya memicu keputusan keduanya untuk melangsungkan negosiasi secara tertutup.

Kedua, adalah ketidakpastian terhadap gangguan dan hambatan yang berasal dari *spoilers*. *Spoilers* adalah pihak-pihak yang menentang peserta negosiasi dan memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Pada proses negosiasi antara Israel dan Palestina *spoilers* yang cukup dikhawatirkan adalah Hamas dan Partai Likud. Partai Likud sebagai oposisi pemerintahan Israel saat itu, tentu saja akan menolak keputusan keterlibatan PLO tersebut karena bertentangan dengan prinsip yang telah mereka pertahankan selama ini. Apalagi dengan adanya kesediaan Israel untuk memberikan Jalur Gaza kepada PLO, dimana banyak permukiman masyarakat Israel didalamnya, dikhawatirkan akan menambah protes golongan Likud terhadap keberlangsungan proses negosiasi Oslo. Sedangkan Hamas merupakan golongan oposisi PLO saat itu. Semenjak terbentuknya Hamas pada tahun 1988, organisasi ini secara tegas menentang kehadiran Israel di tanah Palestina. Apalagi untuk berdamai dengan Israel adalah hal terakhir yang mungkin dipikirkan oleh Hamas. Pasca Perang Teluk, Hamas semakin memberikan tekanan kepada PLO yang dipandang semakin lunak kepada Israel. Hamas juga semakin sering melakukan serangan-serangan terhadap penduduk Israel dan menyatakan komitmennya untuk menghukum warga Palestina yang bekerja sama dengan Israel. Hal ini cukup membuat PLO merasa khawatir terhadap tindakan Hamas jika mengetahui adanya negosiasi yang akan terjalin antara Israel dan PLO.

Ketiga, adalah ketidakpastian dalam menentukan kepentingan dan prioritas untuk negosiasi. Para pihak peserta negosiasi seringkali tidak yakin bagaimana untuk menyatukan kepentingan dan prioritas pihak sendiri dan pihak lawan. Penyatuan ini dibutuhkan agar tidak terjadinya ketidakpastian terhadap kepentingan dan prioritas yang sebenarnya dari proses negosiasi. Di dalam kasus proses negosiasi Oslo, ketidakmampuan untuk menyatukan kepentingan dari kedua belah pihak pun terjadi. Bagi Israel, kepentingan yang paling utama saat itu adalah penghentian kekerasan terhadap dirinya karena ada kekhawatiran terhadap peningkatan penggunaan misil balistik, senjata kimia, dan biologi pasca terjadinya Intifada dan Perang Teluk. Sedangkan bagi PLO, kepentingan Palestina yang paling utama saat itu adalah penghentian pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan pengembalian kedua daerah tersebut sesuai kesepakatan

Camp David 1979 yang selama ini telah memicu kemarahan masyarakat Palestina. Perbedaan kepentingan dari Israel dan Palestina inilah yang mungkin memicu keputusan kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi secara tertutup. Dengan negosiasi tertutup, proses perdamaian dapat terus berjalan walaupun kedua belah pihak masih sulit menyatukan kepentingan mereka hingga akhirnya kepentingan kedua belah pihak dapat disatukan.

Dan **keempat**, adalah ketidakpastian terhadap hasil dari negosiasi Oslo itu sendiri. Tidak ada hasil yang pasti dalam pelaksanaan suatu negosiasi. Terlebih lagi untuk konflik yang masih memanas, hasil yang diharapkan dari suatu negosiasi semakin tidak pasti. Pada proses negosiasi Oslo, ketidakpastian yang melanda Israel dapat ditemukan ketika Shimon Peres untuk pertama kalinya mengabarkan negosiasi ini kepada Yitzak Rabin. Peres meyakinkan Rabin bahwa negosiasi Oslo ini aman untuk diikuti oleh Israel dan beresiko kecil karena belum adanya komitmen Israel secara resmi. Sedangkan dari sisi PLO, keinginannya untuk melangsungkan negosiasi secara rahasia disebabkan karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gagal meraih kesepakatan, PLO dapat menyangkal keterlibatannya. Kegagalan dari suatu proses negosiasi, dikhawatirkan akan semakin memperburuk popularitas dan reputasi PLO di kalangan masyarakat Palestina.

Penulis juga menemukan bahwa berdasarkan ketidakpastian-ketidakpastian tersebut, yang kemudian akan menjadi sebab keputusan para pemimpin untuk menggunakan negosiasi tertutup, akan menggiring keberhasilan negosiasi tertutup dalam meraih kesepakatan. Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan keberhasilan negosiasi tertutup dibandingkan dengan negosiasi yang terbuka. **Pertama**, dari para peserta negosiasinya, dimana kini PLO telah dilibatkan dan adanya kemampuan dari para negosiator untuk dekat dengan para pemimpin sehingga mereka lebih leluasa dalam melakukan proses negosiasi. **Kedua**, dari tidak adanya intervensi (non intervensi), dimana kedua belah pihak dapat dengan leluasa menyampaikan ide dan permasalahan mereka tanpa harus khawatir akan adanya gangguan atau tekanan dari pihak oposisi ekstrim atau dari pihak luar. **Ketiga**, dari mediator, dimana peran dari mediator untuk terus mempertahankan sifat tertutup selama proses negosiasi berlangsung juga sangat penting. **Keempat**,

dari butir-butir kesepakatan yang diraih, dimana dengan keleluasaan yang dimiliki oleh para delegasi negosiasi tertutup untuk menyatakan fakta-fakta yang menjadi perhatian dari masing-masing pihak, titik temu untuk menemukan solusi yang tepat lebih mudah untuk dicapai dan tepat sasaran. **Kelima**, dari sifat negosiasinya yang aman, dimana dengan negosiasi tertutup para negosiator bahkan para pemimpin yang dekat dengan mereka dapat menyelamatkan *prestise* masing-masing jika ternyata negosiasi yang diusung tidak berhasil atau gagal dalam meraih kesepakatan.

Berdasarkan kesimpulan dari tiap-tiap bab tersebut, penulis akhirnya memberikan kesimpulan yang menyeluruh bahwa keputusan para pemimpin untuk menyelenggarakan negosiasi tertutup berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi saat itu, yang tidak memungkinkan untuk bernegosiasi secara terbuka, adalah tepat. Negosiasi tertutup, dengan kemampuan yang dimilikinya, telah membuat kedua belah pihak berhasil untuk meraih kesepakatan damai diantara mereka.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kasus Oslo Agreement antara Israel dan Palestina, penulis akan memberika beberapa saran untuk penggunaan *back channel negotiation* atau negosiasi tertutup pada penyelesaian konflik dimasa depan. Saran-saran tersebut antara lain:

- a. Penggunaan *back channel negotiation* akan lebih baik dilakukan jika telah timbul 4 (empat) kategori ketidakpastian yang dapat menjadi dilema bagi para peserta negosiator untuk melangsungkan proses perdamaian. Karena dengan tidak adanya dilema yang perlu dihadapi, maka akan lebih baik jika negosiasi biasa (terbuka) yang dijalankan. Sebagai contoh, seandainya pemerintah Israel dan PLO telah mendapatkan dukungan dari oposisinya (Hamas dan Partai Likud) untuk berdamai, maka negosiasi tertutup tidak perlu untuk dilakukan. Karena jika negosiasi tertutup terus dilakukan, dan jika ketahuan, akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap wakil-wakil rakyat tersebut. Hal ini kemudian akan mempersulit pemerintah Israel dan PLO dalam meyakinkan rakyatnya kembali untuk berdamai dengan pihak musuh.

- b. *Back channel negotiation* dapat digunakan untuk mencapai suatu kesepakatan yang akan memicu terbentuknya kesepakatan-kesepakatan perdamaian berikutnya. Sebagai contoh, Oslo Agreement antara Israel dan Palestina pada akhirnya akan memicu terbentuknya kesepakatan-kesepakatan lainnya seperti pendatangan Transfer Kekuatan dan Tanggung Jawab Terhadap Tepi Barat pada tahun 1994; penandatanganan perjanjian sementara tentang Transfer Pengawasan Terhadap Masyarakat Palestina di Wilayah Jajahan pada tahun 1995; penandatanganan Wye River Memorandum pada tahun 1998; kesepakatan untuk merevisi Wye River Memorandum pada tahun 1999; dan negosiasi Camp David II pada tahun 2000.
- c. Di dalam menggunakan *back channel negotiation* sebaiknya para delegasi tidak menggunakan waktu yang terlalu lama, karena akan semakin sulit untuk ditutupi dari *spoilers*. Semakin lama *spoilers* akan semakin curiga sehingga dikhawatirkan proses negosiasi yang seharusnya meraih kesepakatan damai akan berhenti di tengah jalan. Sebagai contoh, proses negosiasi yang dilakukan oleh Israel dan PLO diselenggarakan hanya dalam waktu 8 (delapan) bulan dari Januari hingga Agustus. Hal ini dilakukan mengingat adanya kekhawatiran terhadap kecurigaan *spoilers* yang nantinya akan menghambat jalannya proses negosiasi.
- d. Ketika kesepakatan damai telah diraih dan negosiasi tertutup telah dikemukakan di hadapan publik, sebaiknya hasil dari negosiasi tersebut sesegera mungkin diimplementasikan dengan baik. Karena walau bagaimanapun, hasil baik dari suatu kesepakatan akan dinilai ketika implementasi sudah mulai dijalankan. Dengan begitu, kepercayaan dari *spoilers* dan pihak-pihak lain yang semula meragukan kesepakatan ini, akan diperoleh seiring dengan berjalannya waktu. Sebagai contoh, di dalam Oslo Agreement antara Israel dan Palestina, telah diatur bahwa implementasi penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan Jericho (Tepi Barat) akan dilakukan segera setelah penandatanganan dan Israel diharuskan untuk menyelesaikan penarikan mundur ini dalam waktu 3 (tiga) minggu setelah penandatanganan.

6.3 Refleksi Pasca Oslo Agreement

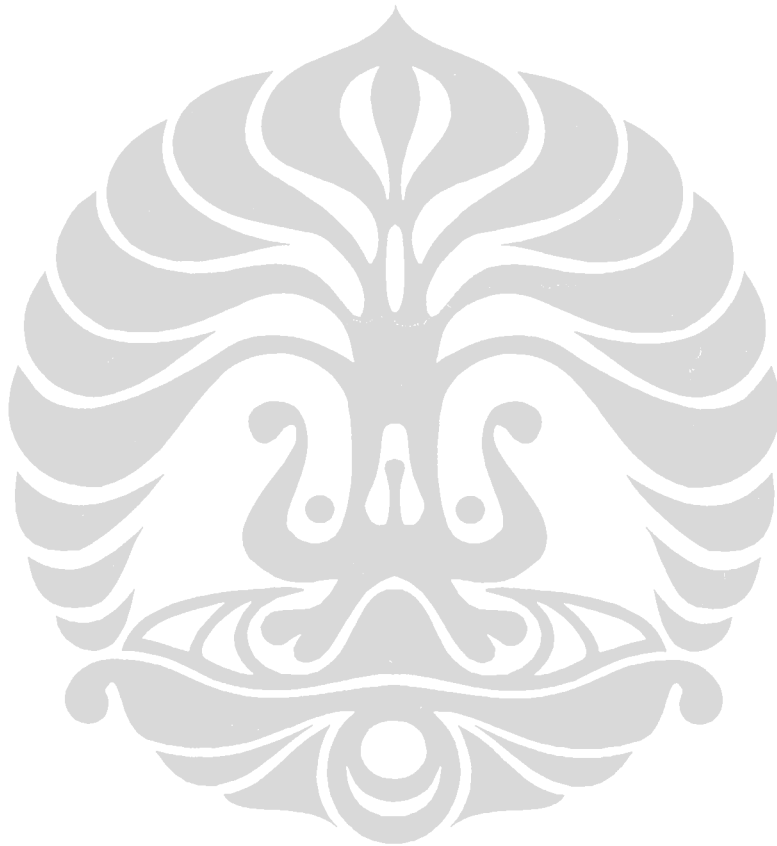
Kini enam belas tahun setelah Oslo Agreement disepakati, hubungan antara Israel dan Palestina tetap saja memburuk. Butir-butir perdamaian yang telah dicapai ternyata tidak mampu meredam konflik yang berkepanjangan diantara kedua belah pihak tersebut. Walaupun Israel telah menarik mundur pasukannya dari Jalur Gaza, kekacauan politik di daerah itu tidak dapat dihindari. Ini disebabkan karena adanya dualisme kekuasaan di daerah tersebut, yakni Jalur Gaza merupakan basis pasukan Hamas sedangkan tampuk kekuasaan atas Palestina ada ditangan Fatah (PLO).

Hubungan buruk antara Israel dan Palestina semakin bertambah pasca kemenangan Hamas pada pemilu Palestina tahun 2006. Kemenangan Hamas ini seakan menutup pintu negosiasi untuk perdamaian diantara kedua belah pihak karena memunculkan reaksi negatif dari Israel, Amerika Serikat, dan para pendonor. Mereka berkampanye untuk menghentikan bantuan terhadap Palestina karena takut bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendanai aksi-aksi teror.

Selain itu usaha untuk melaksanakan kontak *people to people* saat ini cenderung sulit dilakukan. Ada beberapa penghalang yang terlebih dahulu harus diatasi agar dapat membangun kontak-kontak tersebut. *Declaration of Principles* secara otomatis membelah wilayah mandatoris Palestina ke dalam dua entitas politik yang berbeda, Israel dan Palestina. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh kedaulatan yang memiliki konsekuensi logis pada perbedaan identitas kedua bangsa. Akibat dari pemisahan politik tersebut adalah semakin rumitnya hubungan kedua bangsa karena adanya batasan-batasan politik. Misalnya, kebutuhan bagi warga Palestina untuk memiliki kartu bebas lintas ketika mereka akan masuk ke wilayah Israel sebagai pengganti visa. Kebutuhan-kebutuhan administrasi kenegaraan semacam ini menjadi salah satu penghambat yang baru muncul pasca Oslo Agreement.

Beberapa hal inilah yang merupakan pekerjaan rumah dari sekian banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak agar penyelenggaraan proses perdamaian dapat terus dilanjutkan. Keinginan untuk menghasilkan suatu penyelesaian damai yang permanen diantara keduanya tidaklah berlebihan mengingat telah sekian lama wilayah ini menderita banyak kerugian akibat

peperangan. Kedepannya, proses perdamaian antara Israel dan Palestina diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dan mampu memberikan kecerahan di tengah-tengah keputusan akan perdamaian di bumi Timur Tengah.



DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Berridge, G.R. (1995). *Diplomacy, Theory and Practice*. Great Britain: Hartnolls Limited.
- Cohen, Raymond. (1991). *Negotiating Across Cultures*. Washington, D.C: United States Institute of Peace.
- Halliday, Fred. (2005). *The Middle East in International Relations*. United States of America: Cambridge University Press.
- Plischke, Elmer. (1979). *Modern Diplomacy*. United States of America: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Roy, S.L. (1991). *Diplomasi* (Terjemahan oleh Herwanto dan Mirsawati). Jakarta: CV. Rajawali.
- Smith, Charles. D. (2001). *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*. United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001.
- Wardoyo, Broto & Wirawan, Hariyadi. (2008). *Membidik Bintang, Membangun Skema Mediasi Indonesia dalam Proses Perdamaian Israe-Palestina*. Depok: FISIP UI Press.
- Zartman, I. William. (2001). *Preventive Negotiation*. United States of America: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Zartman, I. William. (2008). *Negotiation and Conflict Management*. United Kingdom: Routledge.

2. Tesis/Disertasi

- Asselin, Pierre. (1997). *The Quest for a Negotiated Settelement of the Indochinese Crisis: North Vietnamese-American Secret Diplomacy, 1968-1973*. United States: UMI Company.
- Nelson, Anna Louise Kasten. (1972). *The Secret Diplomacy of James K. Polk During the Mexican War, 1946-1847*. United States: The George Washington University.

Wanis-St. John, Anthony. (2001). *Back Channel Diplomacy: The Strategic Use of Multiple Channels of Negotiation in Middle East Peacemaking*. United States: Tufts University.

3. Jurnal Ilmiah

Barak, Oren. (2005). *The Failure of the Israeli-Palestinian Peace Process, 1993-2000*. Journal of Peace Research, 42:6, h. 721.

Bercovitch, Jacob & Jackson, Richard. (2001). *Negotiation or Mediation?; An Exploration of Factors Affecting the Choice of Conflict Management in International Conflict*. Negotiation Journal, 17:1, h. 60.

Davison, W. Phillip. (1974). *News Media and International Negotiation*. The Public Opinion Quarterly, 38:2, h. 177-178.

Kriesberg, Louis. (2001). *Mediation and the Transformation of the Israeli-Palestinian Conflict*. Journal of Peace Research, h. 373-392.

Mattar, Phillip. (1993). *The PLO and the Gulf Crisis*. Middle East Journal, 48:1, h. 31.

Shaath, Nabil. (1993). *The Oslo Agreement. An Interview with Nabil Shaath*. Journal of Palestine Studies, 23:1, h. 11.

Shalaim, Avi. (1994). *Oslo Accord*. Journal of Palestine Studies, 23:3, h. 30.

Slater, Jerome. (1991). *A Palestinian State and Israeli Security*. Political Science Quarterly, 106:3, h. 412.

Slater, Jerome. (1997-1998). *Netanyahu, A Palestinian State, and Israeli Security Reassessed*, Political Science Quarterly, 112:4, h. 677.

Slater, Jerome. (2001). *What Went Wrong? The Collapse of Israeli-Palestinian Peace Process*. Political Science Quarterly, 116:2, h. 176.

Stasavage, David. (2004). *Open-Door or Close-Door? Transparency in Domestic and International Bargaining*. Cambridge University Press on behalf of the International Organization Foundation, 58:4, h. 683-685.

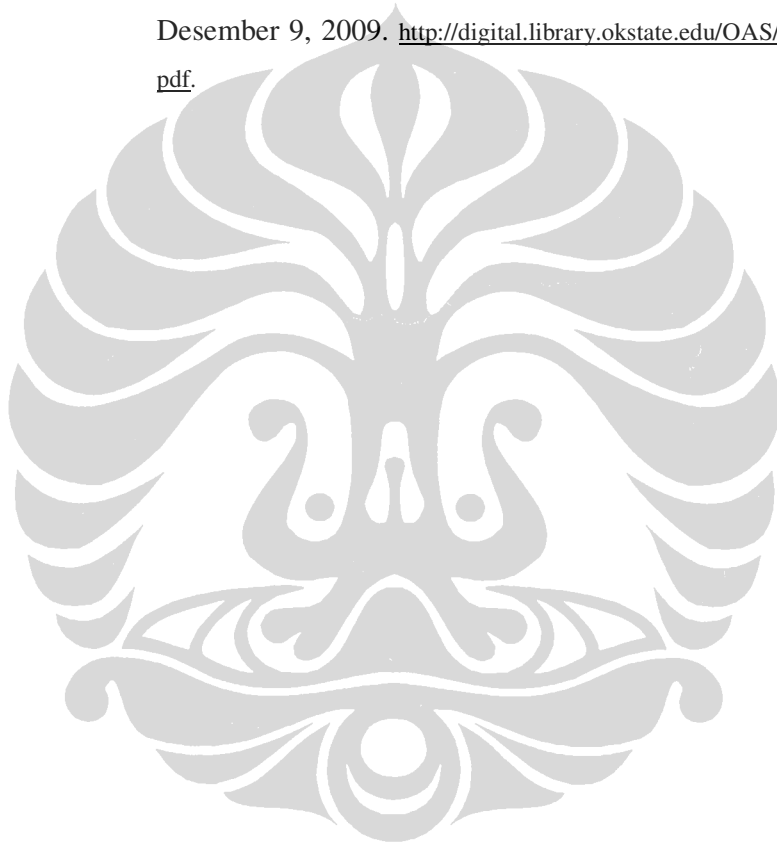
Steinberg, Gerald. M. (2002). *Unripeness and Conflict Management: Re-Examining the Oslo Process and its Lessons*. Israel: Bar Illan University, h. 2.

Waage, Hilde Henriksen. (2002). *Explaining the Oslo Backchannel: Norway's Political Past in the Middle East*. *The Middle East Journal*, 56:4, h. 600.

Wanis-St. John, Anthony. (2006). *Back-Channel Negotiation: International Bargaining in the Shadows*. *Negotiation Journal*, 22:2, h. 123.

4. Website Internet

Willis, Edward. F. *Secret Diplomacy in A Democracy: Sir Edward Grey*. Desember 9, 2009. http://digital.library.okstate.edu/OAS/oas_pdf/v19/p153_154.pdf.



LAMPIRAN A
PETA WILAYAH PALESTINA



Sumber: CIA Fact Book

LAMPIRAN B KRONOLOGIS KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA

1000 SM	Berdirinya Kerajaan Israel di wilayah Palestina
700 SM	Kerajaan Israel mulai ditaklukkan oleh Assyria, Babylon, Romawi, pasukan gurun, crusader, hingga Ottoman. Semenjak penaklukan tersebut banyak orang-orang Yahudi yang terusir dari wilayahnya
1895	Yahudi mulai kembali ke Palestina
1914	Bangsa Yahudi yang telah kembali ke Palestina semenjak 1895 telah mencapai empat puluh ribu orang. Masyarakat Arab Palestina mulai resah
1917 2 November	Inggris membentuk Deklarasi Balfour yang menjanjikan kampung halaman untuk Yahudi di Palestina. Hal ini dilakukan Inggris sebagai pengganti atas bantuan Yahudi kepada Inggris untuk memenangkan Perang Dunia I
1937	<i>Palestina Royal (Peel) Commission</i> mengajukan rencana pemisahan (<i>Partition Plan</i>), namun ditolak oleh Arab Palestina
1945	PBB, melalui UNSCOP, merekomendasikan rencana pemisahan (<i>UN Partition Plan</i>) dengan membagi wilayah Palestina menjadi dua, untuk Arab dan Israel. Arab menolaknya.
1948 14 Mei	Negara Israel berdiri dengan wilayah teritorial berdasarkan <i>UN Partition Plan</i>
11 Juni	Serangan I negara-negara Arab terhadap Israel, diakhiri dengan gencatan senjata yang digagas oleh PBB
6 Juli	Gencatan senjata berakhir, negara-negara Arab melakukan serangan II terhadap Israel. Pada perang ini, negara-negara Arab menerima kekalahan besar, terutama masyarakatnya yang berada di Palestina. Serangan ini berakhir melalui gencatan senjata.
1956	Perang di Terusan Suez antara Israel dengan Mesir. Perang ini dipicu atas tindakan Mesir yang tidak mengizinkan kapal-kapal Israel ataupun kapal-kapal negara lain yang akan menuju Israel untuk melewati Terusan Suez.

- 1957** Perang Terusan Suez berakhir dengan adanya tekanan Amerika Serikat terhadap Israel untuk menarik mundur pasukannya.
- 1958** Terbentuknya Fatah
- 1964**
28 Mei Liga Arab membentuk PLO yang akan bergerak sebagai perwakilan masyarakat Palestina dan berjuang untuk membebaskan Palestina dari kekuasaan Israel
- 1967** Perang Enam Hari antara Israel melawan Mesir dan Syria. Perang ini dipicu atas dukungan Syria terhadap Fatah yang melakukan infiltrasi terhadap Israel. Untuk mengakhiri perang ini Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 242, yang berisikan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya, serta penghormatan dan kemerdekaan setiap negara yang berada di Timur Tengah.
- 1969**
PLO Yasser Arafat, yang berasal dari Fatah, menjadi pemimpin PLO
- 1973**
6 Oktober Perang Yom Kippur antara Israel melawan Mesir dan Syria. Perang ini didasarkan atas kekhawatiran negara-negara Arab akan keberadaan permukiman Israel yang terus bertambah.
- 22 Oktober Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 338 untuk menghentikan Perang Yom Kippur. Resolusi ini menghendaki diadakannya negosiasi diantara pihak-pihak yang bertikai berdasarkan Resolusi No 242
- 1978**
5-7 Desember Negosiasi Camp David, yang menghasilkan dua kesepakatan. Pertama, kesepakatan tentang penentuan masa depan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otonomi penuh masyarakat Arab Palestina, dibawah pengawasan Jordania. Kedua, perjanjian damai antara Israel dan Mesir serta pengembalian Semenanjung Sinai kepada Mesir
- 1979** Kesepakatan perdamaian antara Israel dengan Mesir.
- 1987** Terjadinya Intifada yakni pemberontakan masyarakat Palestina terhadap Israel
- 1988** Terbentuknya Hamas

- 1990**
2 Agustus Irak menyerang Kuwait (Perang Teluk). Kerugian yang diakibatkan oleh perang ini tidak hanya dirasakan oleh Kuwait, tetapi juga oleh masyarakat Palestina karena banyak dari mereka memiliki mata pencaharian di Kuwait
- 1991**
28 Februari Gencatan senjata untuk menghentikan Perang Teluk.
Oktober Dimulainya *Madrid Talks*
- 1993**
Madrid Talks di Washington mengalami kemacetan, Israel dan Palestina dengan bantuan Norwegia mulai menjalankan negosiasi lainnya, yakni negosiasi Oslo



LAMPIRAN C KRONOLOGIS PROSES NEGOSIASI OSLO

Tahap I	20 Januari 1993 – 9 Mei 1993 , ditandai dengan adanya perwakilan resmi dari PLO tapi belum ada perwakilan resmi dari Israel
20 Januari	Dimulainya ronde I dimana para negosiator menyetujui penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza. Selain itu para negosiator juga menyetujui kebutuhan untuk memfasilitasi bantuan internasional dan investasi di wilayah Palestina serta kebutuhan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi antara Israel dan Palestina.
11-12 Februari	Ronde II negosiasi dimana Palestina menginginkan Jalur Gaza dan Tepi Barat untuk menjadi bagian pemerintahan otonomi Palestina. Israel menolak ide tersebut karena tidak ingin Palestina menguasai juga Jerussalem yang berada di Tepi Barat
20-21 Maret	Ronde III negosiasi dimana masing-masing delegasi telah menghasilkan kesepakatan tentang keterlibatan masing-masing pihak yang tercantum di salah satu pasal dari <i>Declaration of Principles</i>
30 April	Ronde IV negosiasi dimana negosiator Palestina menggantikan permintaan atas Tepi Barat menjadi permintaan atas Jericho saja, yaitu salah satu kota kecil di Tepi Barat
8-9 Mei	Ronde V negosiasi dimana mendiskusikan tentang kemajuan Israel dalam membangun persetujuan internal pada rancangan deklarasi
Tahap II	20 Mei 1993 – 15 Agustus 1993 , ditandai dengan adanya perwakilan resmi dari masing-masing pihak
20 Mei	Dimulainya ronde VI dimana pada ronde ini telah hadir perwakilan resmi Israel yaitu Uri Savir, Direktur Umum Kementerian Luar Negeri Israel
14-14 Juni	Ronde VII negosiasi Oslo
25-27 Juni	Ronde VIII negosiasi dimana negosiasi Oslo kedatangan pengacara Israel, Joel Singer

- 4-6 Juli Ronde IX negosiasi dimana telah ada rancangan baru *Declaration of Principles* yang didalamnya termasuk pengaturan tentang penyerahan otonomi secara perlahan-lahan kepada Palestina
- 11 Juli Ronde X negosiasi dimana Norwegia memasukkan konsep *safe passage* sebagai pengganti wilayah tambahan yang diinginkan PLO
- 24-26 Juli Ronde XI negosiasi dimana negosiator Palestina mengajukan beberapa permintaan baru seperti pembentukan polisi Palestina. Sedangkan Israel menyatakan kekhawatirannya pada isu keamanan dan pembatasan kekuasaan *Palestinian Council*
- 26 Juli Terjadi krisis negosiasi Oslo karena masih adanya beberapa hal yang belum mencapai kesepakatan seperti penentuan status final, masalah pengungsi, dan partisipasi masyarakat Palestina di dalam pemilihan umum
- 13-15 Agustus Ronde XII negosiasi dimana Shimon Peres dan Yasser Arafat terlibat langsung di dalam negosiasi Oslo untuk memecahkan krisis
- 19 Agustus (sore) Masa berlaku periode sementara telah ditentukan dimana penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza akan menandai dimulainya periode sementara
- 19 Agustus (malam) Penandatanganan *Declaration of Principles on Interim Self Government Arrangements* oleh Abu Ala dan Hassan Asfour sebagai perwakilan PLO, serta Savir dan Singer sebagai perwakilan Israel
- 13 September Penandatanganan Oslo Agreement yang dilakukan di Washington, disertai pula jabat tangan antara Yitzak Rabin dan Yasser Arafat

LAMPIRAN D:

DOKUMEN-DOKUMEN

OSLO AGREEMENT



=====

Israel Information Service Gopher
Director: Chaim Shacham, First Secretary
Information Division Israel Foreign Ministry - Jerusalem
Mail all Queries to ask@israel-info.gov.il

=====

ISRAEL-PLO RECOGNITION

1. LETTER FROM YASSER ARAFAT TO PRIME MINISTER RABIN:

September 9, 1993

Mr. Prime Minister,

The signing of the Declaration of Principles marks a new era in the history of the Middle East. In firm conviction thereof, I would like to confirm the following PLO commitments:

The PLO recognizes the right of the State of Israel to exist in peace and security.

The PLO accepts United Nations Security Council Resolutions 242 and 338.

The PLO commits itself to the Middle East peace process, and to a peaceful resolution of the conflict between the two sides and declares that all outstanding issues relating to permanent status will be resolved through negotiations.

The PLO considers that the signing of the Declaration of Principles constitutes a historic event, inaugurating a new epoch of peaceful coexistence, free from violence and all other acts which endanger peace and stability. Accordingly, the PLO renounces the use of terrorism and other acts of violence and will assume responsibility over all PLO elements and personnel in order to assure their compliance, prevent violations and discipline violators

In view of the promise of a new era and the signing of the Declaration of Principles and based on Palestinian acceptance of Security Council Resolutions 242 and 338, the PLO affirms that those articles of the Palestinian Covenant which deny Israel's right to exist, and the provisions of the Covenant which are inconsistent with the commitments of this letter are now inoperative and no longer valid. Consequently, the PLO undertakes to submit to the Palestinian National Council for formal approval the necessary changes in regard to the Palestinian Covenant.

Sincerely,

Yasser Arafat
Chairman
The Palestine Liberation Organization

Yitzhak Rabin
Prime Minister of Israel

2. LETTER FROM YASSER ARAFAT TO NORWEGIAN FOREIGN MINISTER:

September 9, 1993

Dear Minister Holst,

I would like to confirm to you that, upon the signing of the Declaration of Principles, the PLO encourages and calls upon the Palestinian people in the West Bank and Gaza Strip to take part in the steps leading to the normalization of life, rejecting violence and terrorism, contributing to peace and stability and participating actively in shaping reconstruction, economic development and cooperation.

Sincerely,

Yasser Arafat
Chairman
The Palestine Liberation Organization

His Excellency
Johan Jorgen Holst
Foreign Minister of Norway

3. LETTER FROM PRIME MINISTER RABIN TO YASSER ARAFAT:

September 9, 1993

Mr. Chairman,

In response to your letter of September 9, 1993, I wish to confirm to you that, in light of the PLO commitments included in your letter, the Government of Israel has decided to recognize the PLO as the representative of the Palestinian people and commence negotiations with the PLO within the Middle East peace process.

Yitzhak Rabin
Prime Minister of Israel

Yasser Arafat
Chairman
The Palestinian Liberation Organization

=====

Israel Information Service Gopher
Director: Chaim Shacham, First Secretary
Information Division Israel Foreign Ministry - Jerusalem
Mail all Queries to ask@israel-info.gov.il

=====

DECLARATION OF PRINCIPLES ON
INTERIM SELF-GOVERNMENT ARRANGEMENTS

The Government of the State of Israel and the P.L.O. team (in the Jordanian-Palestinian delegation to the Middle East Peace Conference) the "Palestinian Delegation", representing the Palestinian people, agree that it is time to put an end to decades of confrontation and conflict, recognize their mutual legitimate and political rights, and strive to live in peaceful coexistence and mutual dignity and security and achieve a just, lasting and comprehensive peace settlement and historic reconciliation through the agreed political process. Accordingly, the, two sides agree to the following principles:

Article I

AIM OF THE NEGOTIATIONS

The aim of the Israeli-Palestinian negotiations within the current Middle East peace process is, among other things, to establish a Palestinian Interim Self-Government Authority, the elected Council the "Council"), for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a transitional period not exceeding five years, leading to a permanent settlement based on Security Council Resolutions 242 and 338.

It is understood that the interim arrangements are an integral part of the whole peace process and that the negotiations on the permanent status will lead to the implementation of Security Council Resolutions 242 and 338.

Article II

FRAMEWORK FOR THE INTERIM PERIOD

The agreed framework for the interim period is set forth in this Declaration of Principles.

Article III

ELECTIONS

1. In order that the Palestinian people in the West Bank and Gaza Strip may govern themselves according to democratic principles, direct, free and general political elections will be held for the Council under agreed supervision and international observation, while the Palestinian police will ensure public order.
2. An agreement will be concluded on the exact mode and conditions of the elections in accordance with the protocol attached as Annex I, with the goal of holding the elections not later than nine months after the entry into force of this Declaration of Principles.
3. These elections will constitute a significant interim preparatory step toward the realization of the legitimate rights of the Palestinian people and their just requirements.

Article IV

JURISDICTION

Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations. The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit, whose integrity will be preserved during the interim period.

Article V

TRANSITIONAL PERIOD AND PERMANENT STATUS NEGOTIATIONS

1. The five-year transitional period will begin upon the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area.
2. Permanent status negotiations will commence as soon as possible, but not later than the beginning of the third year of the interim period, between the Government of Israel and the Palestinian people representatives.
3. It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, including: Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements, borders, relations and cooperation with other neighbors, and other issues of common interest.
4. The two parties agree that the outcome of the permanent status negotiations should not be prejudiced or preempted by agreements reached for the interim period.

Article VI

PREPARATORY TRANSFER OF POWERS AND RESPONSIBILITIES

1. Upon the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and the Jericho area, a transfer of authority from the Israeli military government and its Civil Administration to the authorised Palestinians for this task, as detailed herein, will commence. This transfer of authority will be of a preparatory nature until the inauguration of the Council.
2. Immediately after the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area, with the view to promoting economic development in the West Bank and Gaza Strip, authority will be transferred to the Palestinians on the following spheres: education and culture, health, social welfare, direct taxation, and tourism. The Palestinian side will commence in building the Palestinian police force, as agreed upon. Pending the inauguration of the Council, the two parties may negotiate the transfer of additional powers and responsibilities, as agreed upon.

Article VII

INTERIM AGREEMENT

1. The Israeli and Palestinian delegations will negotiate an agreement on the interim period (the "Interim Agreement")
2. The Interim Agreement shall specify, among other things, the structure of the Council, the number of its members, and the transfer of powers and responsibilities from the Israeli military government and its Civil Administration to the Council. The Interim Agreement shall also specify the Council's executive authority, legislative authority in accordance with Article IX below, and the independent Palestinian judicial organs.
3. The Interim Agreement shall include arrangements, to be implemented upon the inauguration of the Council, for the assumption by the Council of all of the powers and responsibilities transferred previously in accordance with Article VI above.
4. In order to enable the Council to promote economic growth, upon its inauguration, the Council will establish, among other things, a Palestinian Electricity Authority, a Gaza Sea Port Authority, a Palestinian Development Bank, a Palestinian Export Promotion Board, a Palestinian Environmental Authority, a Palestinian Land Authority and a Palestinian Water Administration Authority, and any other Authorities agreed upon, in accordance with the Interim Agreement that will specify their powers and responsibilities.

5. After the inauguration of the Council, the Civil Administration will be dissolved, and the Israeli military government will be withdrawn.

Article VIII

PUBLIC ORDER AND SECURITY

In order to guarantee public order and internal security for the Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip, the Council will establish a strong police force, while Israel will continue to carry the responsibility for defending against external threats, as well as the responsibility for overall security of Israelis for the purpose of safeguarding their internal security and public order.

Article IX

LAWS AND MILITARY ORDERS

1. The Council will be empowered to legislate, in accordance with the Interim Agreement, within all authorities transferred to it.
2. Both parties will review jointly laws and military orders present in force in remaining spheres.

Article X

JOINT ISRAELI-PALESTINIAN LIAISON COMMITTEE

In order to provide for a smooth implementation of this Declaration of Principles and any subsequent agreements pertaining to the interim period, upon the entry into force of this Declaration of Principles, a Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee will be established in order to deal with issues requiring coordination, other issues of common interest, and disputes.

Article XI

ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION IN ECONOMIC FIELDS

Recognizing the mutual benefit of cooperation in promoting the development of the West Bank, the Gaza Strip and Israel, upon the entry into force of this Declaration of Principles, an Israeli-Palestinian Economic Cooperation Committee will be established in order to develop and implement in a cooperative manner the programs identified in the protocols attached as Annex III and Annex IV.

Article XII

LIAISON AND COOPERATION WITH JORDAN AND EGYPT

The two parties will invite the Governments of Jordan and Egypt to participate in establishing further liaison and cooperation arrangements between the Government of Israel and the Palestinian representatives, on the one hand, and the Governments of Jordan and Egypt, on the other hand, to promote cooperation between them. These arrangements will include the constitution of a Continuing Committee that will decide by agreement on the modalities of admission of persons displaced from the West Bank and Gaza Strip in 1967, together with necessary measures to prevent disruption and disorder. Other matters of common concern will be dealt with by this Committee.

Article XIII

REDEPLOYMENT OF ISRAELI FORCES

1. After the entry into force of this Declaration of Principles, and not later than the eve of elections for the Council, a redeployment of Israeli military forces in the West Bank and the Gaza Strip will take place, in addition to withdrawal of Israeli forces carried out in accordance with Article XIV.
2. In redeploying its military forces, Israel will be guided by the principle that its military forces should be redeployed outside populated areas.
3. Further redeployments to specified locations will be gradually implemented commensurate with the assumption of responsibility for public order and internal security by the Palestinian police force pursuant to Article VIII above.

Article XIV

ISRAELI WITHDRAWAL FROM THE GAZA STRIP AND JERICHO AREA

Israel will withdraw from the Gaza Strip and Jericho area, as detailed in the protocol attached as Annex II.

Article XV

RESOLUTION OF DISPUTES

1. Disputes arising out of the application or interpretation of this Declaration of Principles, or any subsequent agreements pertaining to the interim period, shall be resolved by negotiations through the Joint Liaison Committee to be established pursuant to Article X above.
2. Disputes which cannot be settled by negotiations may be resolved by a mechanism of conciliation to be agreed upon by the parties.

3. The parties may agree to submit to arbitration disputes relating to the interim period, which cannot be settled through conciliation. To this end, upon the agreement of both parties, the parties will establish an Arbitration Committee.

Article XVI

ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION CONCERNING REGIONAL PROGRAMS

Both parties view the multilateral working groups as an appropriate instrument for promoting a "Marshall Plan", the regional programs and other programs, including special programs for the West Bank and Gaza Strip, as indicated in the protocol attached as Annex IV.

Article XVII

MISCELLANEOUS PROVISIONS

1. This Declaration of Principles will enter into force one month after its signing.
2. All protocols annexed to this Declaration of Principles and Agreed Minutes pertaining thereto shall be regarded as an integral part hereof.

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel

For the P.L.O.

Witnessed By:

The United States of America

The Russian Federation

ANNEX I

PROTOCOL ON THE MODE
AND CONDITIONS OF ELECTIONS

1. Palestinians of Jerusalem who live there will have the right to participate in the election process, according to an agreement between the two sides.
2. In addition, the election agreement should cover, among other things, the following issues:

- a. the system of elections;
 - b. the mode of the agreed supervision and international observation and their personal composition; and
 - c. rules and regulations regarding election campaign, including agreed arrangements for the organizing of mass media, and the possibility of licensing a broadcasting and TV station.
3. The future status of displaced Palestinians who were registered on 4th June 1967 will not be prejudiced because they are unable to participate in the election process due to practical reasons

ANNEX II

PROTOCOL ON WITHDRAWAL OF ISRAELI FORCES FROM THE GAZA STRIP AND JERICHO AREA

1. The two sides will conclude and sign within two months from the date of entry into force of this Declaration of Principles, an agreement on the withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area. This agreement will include comprehensive arrangements to apply in the Gaza Strip and the Jericho area subsequent to the Israeli withdrawal.
2. Israel will implement an accelerated and scheduled withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area, beginning immediately with the signing of the agreement on the Gaza Strip and Jericho area and to be completed within a period not exceeding four months after the signing of this agreement.
3. The above agreement will include, among other things:
 - a. Arrangements for a smooth and peaceful transfer of authority from the Israeli military government and its Civil Administration to the Palestinian representatives.
 - b. Structure, powers and responsibilities of the Palestinian authority in these areas, except: external security, settlements, Israelis, foreign relations, and other mutually agreed matters.
 - c. Arrangements for the assumption of internal security and public order by the Palestinian police force consisting of police officers recruited locally and from abroad holding Jordanian passports and Palestinian documents issued by Egypt). Those who will participate in the Palestinian police force coming from abroad should be trained as police and police officers.
- b. A temporary international or foreign presence, as agreed upon.

- c. Establishment of a joint Palestinian-Israeli Coordination and Cooperation Committee for mutual security purposes.
 - d. An economic development and stabilization program, including the establishment of an Emergency Fund, to encourage foreign investment, and financial and economic support. Both sides will coordinate and cooperate jointly and unilaterally with regional and international parties to support these aims.
 - e. Arrangements for a safe passage for persons and transportation between the Gaza Strip and Jericho area.
1. The above agreement will include arrangements for coordination between both parties regarding passages:
 - a. Gaza - Egypt; and
 - b. Jericho - Jordan.
 2. The offices responsible for carrying out the powers and responsibilities of the Palestinian authority under this Annex II and Article VI of the Declaration of Principles will be located in the Gaza Strip and in the Jericho area pending the inauguration of the Council.
 3. Other than these agreed arrangements, the status of the Gaza Strip and Jericho area will continue to be an integral part of the West Bank and Gaza Strip, and will not be changed in the interim period.

ANNEX III

PROTOCOL ON ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION IN ECONOMIC AND DEVELOPMENT PROGRAMS

The two sides agree to establish an Israeli-Palestinian continuing Committee for Economic Cooperation, focusing, among other things, on the following:

1. Cooperation in the field of water, including a Water Development Program prepared by experts from both sides, which will also specify the mode of cooperation in the management of water resources in the West Bank and Gaza Strip, and will include proposals for studies and plans on water rights of each party, as well as on the equitable utilization of joint water resources for implementation in and beyond the interim period.
2. Cooperation in the field of electricity, including an Electricity Development Program, which will also specify the mode of cooperation for the production, maintenance, purchase and sale of electricity resources.

3. Cooperation in the field of energy, including an Energy Development Program, which will provide for the exploitation of oil and gas for industrial purposes, particularly in the Gaza Strip and in the Negev, and will encourage further joint exploitation of other energy resources. This Program may also provide for the construction of a Petrochemical industrial complex in the Gaza Strip and the construction of oil and gas pipelines.
4. Cooperation in the field of finance, including a Financial Development and Action Program for the encouragement of international investment in the West Bank and the Gaza Strip, and in Israel, as well as the establishment of a Palestinian Development Bank.
5. Cooperation in the field of transport and communications, including a Program, which will define guidelines for the establishment of a Gaza Sea Port Area, and will provide for the establishing of transport and communications lines to and from the West Bank and the Gaza Strip to Israel and to other countries. In addition, this Program will provide for carrying out the necessary construction of roads, railways, communications lines, etc.
6. Cooperation in the field of trade, including studies, and Trade Promotion Programs, which will encourage local, regional and inter-regional trade, as well as a feasibility study of creating free trade zones in the Gaza Strip and in Israel, mutual access to these zones, and cooperation in other areas related to trade and commerce.
7. Cooperation in the field of industry, including Industrial Development Programs, which will provide for the establishment of joint Israeli-Palestinian Industrial Research and Development Centers, will promote Palestinian-Israeli joint ventures, and provide guidelines for cooperation in the textile, food, pharmaceutical, electronics, diamonds, computer and science-based industries.
8. A program for cooperation in, and regulation of, labor relations and cooperation in social welfare issues.
9. A Human Resources Development and Cooperation Plan, providing for joint Israeli-Palestinian workshops and seminars, and for the establishment of joint vocational training centers, research institutes and data banks.
10. An Environmental Protection Plan, providing for joint and/or coordinated measures in this sphere.
11. A program for developing coordination and cooperation in the field of communication and media.
12. Any other programs of mutual interest.

ANNEX IV

PROTOCOL ON ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION
CONCERNING REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS

1. The two sides will cooperate in the context of the multilateral peace efforts in promoting a Development Program for the region, including the West Bank and the Gaza Strip, to be initiated by the G-7. The parties will request the G-7 to seek the participation in this program of other interested states, such as members of the Organisation for Economic Cooperation and Development, regional Arab states and institutions, as well as members of the private sector.
2. The Development Program will consist of two elements:
 - a) an Economic Development Program for the West Bank and the Gaza Strip.
 - b) a Regional Economic Development Program.
 - A. The Economic Development Program for the West Bank and the Gaza strip will consist of the following elements:
 - (1) A Social Rehabilitation Program, including a Housing and Construction Program.
 - (2) A Small and Medium Business Development Plan.
 - (3) An Infrastructure Development Program (water, electricity, transportation and communications, etc.)
 - (4) A Human Resources Plan.
 - (5) Other programs.
 - B. The Regional Economic Development Program may consist of the following elements:
 - (1) The establishment of a Middle East Development Fund, as a first step, and a Middle East Development Bank, as a second step.
 - (2) The development of a joint Israeli-Palestinian-Jordanian Plan for coordinated exploitation of the Dead Sea area.
 - (3) The Mediterranean Sea (Gaza) - Dead Sea Canal.
 - (4) Regional Desalinization and other water development projects.
 - (5) A regional plan for agricultural development, including a coordinated regional effort for the prevention of desertification.

- (6) Interconnection of electricity grids.
 - (7) Regional cooperation for the transfer, distribution and industrial exploitation of gas, oil and other energy resources.
 - (8) A Regional Tourism, Transportation and Telecommunications Development Plan.
 - (9) Regional cooperation in other spheres.
3. The two sides will encourage the multilateral working groups, and will coordinate towards their success. The two parties will encourage intersessional activities, as well as pre-feasibility and feasibility studies, within the various multilateral working groups.

AGREED MINUTES TO THE
DECLARATION OF PRINCIPLES ON
INTERIM SELF-GOVERNMENT ARRANGEMENTS

A. GENERAL UNDERSTANDINGS AND AGREEMENTS

Any powers and responsibilities transferred to the Palestinians pursuant to the Declaration of Principles prior to the inauguration of the Council will be subject to the same principles pertaining to Article IV, as set out in these Agreed Minutes below.

B. SPECIFIC UNDERSTANDINGS AND AGREEMENTS

Article IV

It is understood that:

1. Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations: Jerusalem, settlements, military locations, and Israelis.
2. The Council's jurisdiction will apply with regard to the agreed powers, responsibilities, spheres and authorities transferred to it.

Article VI (2)

It is agreed that the transfer of authority will be as follows:

- (1) The Palestinian side will inform the Israeli side of the names of the authorised Palestinians who will assume the powers, authorities and responsibilities that will

be transferred to the Palestinians according to the Declaration of Principles in the following fields: education and culture, health, social welfare, direct taxation, tourism, and any other authorities agreed upon.

- (2) It is understood that the rights and obligations of these offices will not be affected.
- (3) Each of the spheres described above will continue to enjoy existing budgetary allocations in accordance with arrangements to be mutually agreed upon. These arrangements also will provide for the necessary adjustments required in order to take into account the taxes collected by the direct taxation office.
- (4) Upon the execution of the Declaration of Principles, the Israeli and Palestinian delegations will immediately commence negotiations on a detailed plan for the transfer of authority on the above offices in accordance with the above understandings.

Article VII (2)

The Interim Agreement will also include arrangements for coordination and cooperation.

Article VII (5)

The withdrawal of the military government will not prevent Israel from exercising the powers and responsibilities not transferred to the Council.

Article VIII

It is understood that the Interim Agreement will include arrangements for cooperation and coordination between the two parties in this regard. It is also agreed that the transfer of powers and responsibilities to the Palestinian police will be accomplished in a phased manner, as agreed in the Interim Agreement.

Article X

It is agreed that, upon the entry into force of the Declaration of Principles, the Israeli and Palestinian delegations will exchange the names of the individuals designated by them as members of the Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee.

It is further agreed that each side will have an equal number of members in the Joint Committee. The Joint Committee will reach decisions by agreement. The Joint Committee may add other technicians and experts, as necessary. The

Joint Committee will decide on the frequency and place or places of its meetings.

ANNEX II

It is understood that, subsequent to the Israeli withdrawal Israel will continue to be responsible for external security, and for internal security and public order of settlements and Israelis. Israeli military forces and civilians may continue to use roads freely within the Gaza Strip and the Jericho area.

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel

For the P.L.O.

Witnessed By:

The United States of America

The Russian Federation

<http://almashriq.hiof.no/base/mailpage.html>

980606/b1